

**ABSTRAK**

*Human trafficking* di Thailand berkembang sebagai *problem malignancy* setelah terjadi peningkatan korban hamper disetiap tahunnya. Permasalahan ini semakin kompleks karena *human trafficking* berkaitan dengan prostitusi anak dan wanita. Persoalan tentang *human trafficking* di Thailand telah menyebabkan penurunan citra akibat persepsi buruk terhadap negara ini. Berkembangnya persepsi negatif terhadap Thailand, terkait dengan persoalan *human trafficking* kemudian mendorong berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk secara pro-aktif menjalankan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam mendukung penyelesaian persoalan tersebut. Dalam menangani persoalan *human trafficking*, Thailand menjalankan berbagai kebijakan, termasuk menerima rekomendasi dari UNIAP. Pada kenyataannya pemerintah Thailand mengalami kegagalan dalam menerapkan rekomendasi dari UNIAP. Hal inilah kemudian yang menjadi fokus dari penelitian ini, dimana dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu teori konstruktivisme dan efektifitas kebijakan. Dalam penerapannya, rekomendasi UNIAP diwujudkan melalui penyesuaian perundang-undangan, hingga fasilitasi kerjasama regional dan dengan organisasi internasional. Pada kenyataannya, upaya yang dilakukan pemerintah Thailand tersebut mengalami kegagalan karena respon masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang relatif lemah, serta program-program yang kurang berjalan efektif. Gambaran tentang kegagalan pemerintah Thailand dalam menerima rekomendasi UNIAP ini akan diuraikan secara mendalam pada penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking*, Pemerintah Thailand, UNIAP